

Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2009-2016

Ridzky Giovanni[✉]

Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Oktober 2017
Disetujui desember 2017
Dipublikasikan february 2018

Keywords:

Poverty Level, GRDP, Unemployment, Education

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PDRB, pengangguran, dan pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di pulau Jawa pada tahun 2009-2016. Pulau Jawa memiliki 6 provinsi dengan tingkat kemiskinan yang tergolong tinggi terdapat di 4 provinsi yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY, sedangkan 2 provinsi lainnya yaitu Provinsi DKI dan Banten tingkat kemiskinannya tergolong rendah, sehingga penelitian ini hanya mengambil 4 provinsi yang tingkat kemiskinannya tergolong tinggi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Alat analisis data yang digunakan untuk menganalisis pengaruh faktor tersebut menggunakan regresi data panel. Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa pengangguran dan pendidikan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY pada tahun 2009-2016, sedangkan PDRB berpengaruh terhadap kemiskinan di provinsi tersebut.

Abstract

This research aims to determine the effect of GRDP, unemployment, and education on the poverty level in Java Island in 2009-2016. Java Island has 6 provinces with high poverty level is found in 4 provinces of West Java, Central Java, East Java, and DIY, while the other two provinces of DKI and Banten provinces have low poverty level, so this research only take 4 provinces whose poverty level is high. The data used in this study is secondary data obtained from the Central Agency on Statistics. Data analysis tools used to analyze the influence of these factors using panel data regression. Based on the results of data analysis shows that unemployment and education have no effect on poverty in West Java, Central Java, East Java and Yogyakarta provinces in 2009-2016, while PDRB has an effect on poverty in the province.

PENDAHULUAN

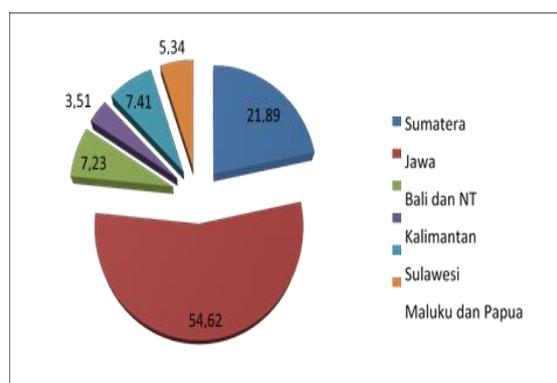
Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu muncul dalam kehidupan masyarakat. Implikasi dari permasalahan kemiskinan dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia, walaupun kehadirannya seringkali tidak disadari oleh manusia yang bersangkutan (Suparlan,1993). Mubyarto (2004) mengatakan bahwa kemiskinan digambarkan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok atau kebutuhan hidup yang minimum yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Dalam definisi yang lebih luas, kemiskinan bersifat multidimensional, artinya kemiskinan adalah ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan manusia yang beraneka ragam yang selanjutnya dapat dipandang melalui berbagai aspek. Ditinjau dari aspek primer kemiskinan meliputi miskin terhadap aset, rendahnya partisipasi organisasi sosial politik, serta terbatasnya pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan aspek sekunder mencakup miskin terhadap jaringan sosial, rendahnya sumber-sumber keuangan dan terbatasnya informasi. Selanjutnya dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, rendahnya penyediaan air bersih, terbatasnya perumahan layak huni, belum meratanya pelayanan kesehatan, tingkat pendidikan rendah, serta dari keseluruhannya saling berkaitan secara langsung maupun tidak langsung (Ala,1981).



Gambar 1. Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2009-2016
Sumber: BPS Statistik Nasional,2016

Pada gambar 1 terlihat bahwa permasalahan kemiskinan di Indonesia masih menjadi perhatian yang serius mengingat masih

tingginya tingkat kemiskinan yang ada yaitu diatas 10%. Tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2009-2016 terus mengalami penurunan, baik dari jumlah penduduk miskin maupun persentase tingkat kemiskinan. persentase penduduk miskin terus menurun dari 14,15 % pada tahun 2009 menjadi 10,78 % pada tahun 2016. Penurunan tingkat kemiskinan tersebut di capai melalui perluasan penciptaan kesempatan kerja, peningkatan dan perluasan program pro-rakyat, serta peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan melalui berbagai kebijakan. Namun dalam tiga tahun terakhir laju penurunan kemiskinan cenderung melambat karena adanya perlambatan laju pertumbuhan pada sektor usaha yang banyak menyerap tenaga kerja dari penduduk miskin, adanya peningkatan garis kemiskinan karena meningkatnya inflasi bahan pangan, serta belum optimalnya sinergi antar program penanggulangan kemiskinan (BAPPENAS, 2013).



Gambar 2. Persebaran Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2016

Sumber: BPS Statistik Nasional,2016

Pada gambar 2 terlihat bahwa persebaran penduduk miskin di Indonesia lebih dari setengahnya terkonsentrasi di pulau Jawa dengan proporsi sebesar 54,62 persen. Besarnya jumlah penduduk miskin di pulau Jawa dipengaruhi oleh banyaknya penduduk yang tinggal di pulau Jawa dan mayoritas persentase tingkat kemiskinan provinsi di pulau Jawa tergolong tinggi. Pulau Jawa memiliki 6 provinsi yaitu Provinsi Jawa Tengah, Jawa

Timur, Jawa Barat, Daerah Istimewa berbeda-beda. Berikut adalah gambaran dari Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Banten. Tingkat tingkat kemiskinan di pulau Jawa pada tahun kemiskinan di setiap provinsi di pulau Jawa 2009-2016:

Tabel 1. tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2009-2016

Provinsi	Tingkat Kemiskinan (%)								Rata-Rata
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Jateng	17.77	16.56	15.76	14.98	14.44	13.58	13.32	13.19	14.94
Jatim	16.68	15.26	14.23	13.08	12.73	12.28	12.28	11.85	13.54
Jabar	11.96	11.27	10.65	9.89	9.61	9.57	9.57	8.77	10.11
DIY	17.29	16.83	16.08	15.88	15.03	13.16	13.16	13.1	15.23
DKI	3.62	3.48	3.75	3.7	3.72	3.61	3.61	3.75	3.71
Banten	7.64	7.16	6.32	5.71	5.89	5.75	5.75	5.36	6.15

Sumber : BPS Nasional, 2016

Dari tabel 1 dapat di lihat bahwa persentase kemiskinan yang paling tinggi terdapat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan rata-rata 15,23% dari tahun 2009-2016. Tingkat kemiskinan tertinggi ke dua setelah Provinsi DIY yaitu Provinsi Jawa Tengah dengan rata-rata 14,94% dari tahun 2009-2016. Untuk persentase kemiskinan yang paling rendah ada di Provinsi DKI Jakarta dengan rata-rata 3,71%, setelah itu Provinsi Banten dengan rata-rata 6,16% dari tahun 2009-

2016. Dilihat dari tingkat kemiskinan 6 provinsi di atas maka dapat disimpulkan bahwa di pulau Jawa hanya terdapat 4 provinsi yang memiliki persentase kemiskinan yang tinggi yaitu Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk melihat kinerja perekonomian secara keseluruhan salah satunya dapat dilihat dari indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berikut adalah rincian PDRB menurut harga konstan di 4 provinsi di pulau Jawa yang digambarkan pada Tabel 2 :

Tabel 2. PDRB 4 Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2009-2016

Provinsi	PDRB Harga Konstan							Rata-Rata
	2009	2010	2012	2013	2014	2015	2016	
Jateng	601.76	623.22	691.34	726.65	764.95	806.77	949.38	715.04
Jatim	980.55	990.64	1124.46	1182.78	1262.68	1331.39	1405.23	1167.76
Jabar	899.37	906.68	1028.4	1149.21	1149.21	1207.08	1275.54	1065.68
DIY	62.26	64.67	71.7	75.62	75.62	83.47	87.86	74.12

Sumber : BPS Nasional, 2016

Selama kurun waktu 2009-2016 pertumbuhan ekonomi provinsi di pulau Jawa di dominasi oleh Provinsi Jawa Timur, hal tersebut bisa di lihat dari tingginya tingkat PDRB dari tahun 2009-2016 di Provinsi Jawa Timur dengan rata-rata nilai PDRB sebesar 1.167,76 Trilyun, kemudian Provinsi Jawa Barat dengan rata-rata sebesar 1.065,68 trilyun, Provinsi Jawa Tengah sebesar 715,04 trilyun, sedangkan nilai PDRB paling rendah terdapat di

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan rata-rata nilai PDRB sebesar 74,12 trilyun rupiah. Selain di lihat dari pertumbuhan ekonomi (PDRB), pengentasan kemiskinan dapat di lihat dari pembentukan sumber daya manusia melalui tingkat pendidikan yang akan berdampak pada peningkatan tingkat produktivitas seseorang. Ketersediaan sarana pendidikan dan kenaikan tingkat pendidikan penduduk dapat digunakan sebagai salah satu

indikator keberhasilan pembangunan. Angka partisipasi sekolah di setiap provinsi menjadi tolak ukur untuk menentukan seberapa besar tingkat pendidikan di setiap provinsi tersebut

yang nantinya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi setiap daerah. Berikut ini adalah persentase angka partisipasi sekolah di empat provinsi di pulau Jawa:

Tabel 3. Angka Partisipasi Sekolah di 4 Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2009-2016

Provinsi	Angka Partisipasi Sekolah (APS) %								Rata-Rata
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Jateng	6.16	62.33	63.31	64.73	66.82	70.59	70.77	71.13	66.41
Jatim	59.93	64.84	64.9	66.68	68.42	71.95	72.09	72.34	67.64
Jabar	59.28	59.8	61.34	63.89	66.39	69.22	69.47	69.89	64.89
DIY	77.15	77.7	79.21	80.71	81.05	83.73	83.88	80.94	80.94

Sumber : BPS Nasional, 2016

Dalam tabel 3 ini menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah (APS) diantara ke empat provinsi di pulau Jawa yang paling tinggi persentasenya terdapat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan rata-rata APS sebesar 80,94%. Sedangkan di tempat kedua berada di Provinsi Jawa Timur dengan rata-rata 67,64%, kemudian Provinsi Jawa Tengah dengan rata-rata APS sebesar 66,41%, dan persentase APS dengan nilai terendah terdapat di Provinsi Jawa Barat sebesar 64,89%. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki persentase angka partisipasi sekolah (APS) paling tinggi di karenakan Provinsi DIY mendapatkan julukan Kota Pelajar sehingga mayoritas masyarakat di Provinsi DIY rata-rata berpendidikan.

Faktor lain yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di suatu daerah adalah faktor pengangguran.

Hal tersebut di karenakan semakin tinggi tingkat pengangguran suatu daerah maka akan berdampak terhadap kemiskinan di daerah tersebut.

Masyarakat yang berada di dalam kondisi pengangguran / tidak bekerja maka masyarakat tersebut akan mengalami kesulitan di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, sehingga akan menyebabkan tingkat kemiskinan di dalam kehidupan bermasyarakat akan meningkat. Berikut ini akan digambarkan persentase tingkat pengangguran terbuka di empat provinsi di pulau Jawa:

Tabel 4. Tingkat Pengangguran Terbuka di 4 Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2009-2016

Provinsi	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)								Rata-Rata
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Jateng	7.33	6.21	7.07	5.61	6.01	5.68	4.99	4.63	5.94
Jatim	5.08	4.25	5.38	4.11	4.3	4.19	4.47	4.21	4.49
Jabar	10.96	10.33	9.96	9.08	9.16	8.45	8.72	8.89	9.44
DIY	6	5.69	4.39	3.9	3.24	3.33	4.07	2.72	4.16

Sumber : BPS Nasional, 2016

Dalam Tabel 4 mengenai tingkat pengangguran terbuka di empat provinsi di pulau Jawa ini menunjukkan bahwa persentase tingkat pengangguran yang paling tinggi berada di Provinsi Jawa Barat dengan rata-rata sebesar 9,44%, kemudian di tempat kedua di Provinsi

Jawa Tengah dengan rata-rata sebesar 5,94%, Provinsi Jawa Timur di tempat ketiga dengan rata-rata sebesar 4,49%, dan persentase tingkat pengangguran terbuka paling rendah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan rata-rata sebesar 4,16%.

Dilihat dari data beberapa variabel ekonomi berupa pertumbuhan ekonomi (PDRB), dan pendidikan di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan DIY pada tahun 2009-2016 yang menunjukkan peningkatan disetiap tahunnya belum mampu untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang masih tergolong tinggi di provinsi tersebut. Sedangkan dilihat dari variabel tingkat pengangguran yang menunjukkan kondisi yang tidak stabil dalam arti mengalami kondisi naik dan turun disetiap tahunnya juga belum mampu untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang terjadi di provinsi tersebut. Tingginya tingkat kemiskinan tersebut menggambarkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan seperti PDRB, pengangguran terbuka, dan pendidikan belum maksimal dalam menyelesaikan masalah kemiskinan di provinsi tersebut pada tahun 2009-2016. Kualitas lingkungan adalah barang publik, berpotensi terkena dampak semua orang. Perilaku pro-lingkungan tingkat individu mempengaruhi kualitas lingkungan secara keseluruhan (Meyer, 2016)

Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh Puspita (2012) yang meneliti tentang kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa variabel PDRB berpengaruh terhadap kemiskinan di provinsi tersebut. Untuk penelitian yang dilakukan oleh Yoga (2012) yang meneliti tentang kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2004-2009 dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa variabel pengangguran tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di provinsi tersebut. Untuk penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2014) yang meneliti tentang tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa variabel pendidikan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di provinsi tersebut. Untuk penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Marmujiono (2014) yang meneliti tentang kemiskinan di Kabupaten Brebes pada tahun 2009-2011 dimana hasil penelitiannya

menyatakan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, dan rasio ketergantungan penduduk berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Brebes pada tahun 2009-2011.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen dan tiga variabel independen. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data atau informasi yang diperoleh dari pihak lain, berupa data-data yang menunjang dengan penelitian ini. Data sekunder yang digunakan adalah penggabungan dari deret berkala (*time series*) dari tahun 2009-2016 dan deret lintang (*cross section*) sebanyak 32 data mewakili 4 provinsi di pulau Jawa yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY. Pemilihan periode ini berdasarkan fenomena tingkat kemiskinan di 4 provinsi yang ada di pulau Jawa yang diikuti oleh tingkat pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil, tingkat pengangguran yang masih tergolong tinggi, dan tingkat pendidikan yang belum merata di provinsi tersebut sehingga penelitian pada periode tersebut menarik untuk diamati serta mempertimbangkan ketersediaan data pada tahun tersebut.

Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen dan tiga variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kemiskinan (P), sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah pendidikan (E), pengangguran (U), dan LogPDRB (E). Variabel PDRB menggunakan Log dikarenakan terdapat hubungan tidak linear antara variabel independen dengan variabel dependen, sehingga variabel PDRB harus di Log supaya dapat membuat hubungan yang tidak linear dapat digunakan dalam model linear agar dapat membuat model yang diregresi menjadi lebih baik (Benoit, 2011). Untuk model yang akan digunakan untuk mengetahui kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY tahun 2009-2016:

$$P = \beta_0 + \beta_{1X1} + \beta_{2X2} + \beta_{3X3} + e \dots \dots \dots (1)$$

Dimana:

- P = Tingkat Kemiskinan (%)
 β_0 = Konstanta
 β_1 = Koefisien Variabel X1
X1 = Tingkat Pendidikan (%)
 β_2 = Koefisien Variabel X2
X2 = Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
 β_3 = Koefisien Variabel X3
X3 = Produk Domestik Regional Bruto (trilyun rupiah)

Fungsi di atas menjelaskan pengertian bahwa kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, tingkat pengangguran terbuka, dan PDRB.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis ekonometrika berupa alat analisis regresi dengan metode *Panel Least Square (PLS)*. Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang proses dan kegiatan serta data yang diperoleh. Dalam menggunakan data panel, ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, yaitu *common effect model*, *fixed effect model*, dan *random effect model*. Dalam pemilihan model yang tepat dari ketiga analisis tersebut, maka perlu dilakukan beberapa pengujian dengan menggunakan uji chow dan uji husman untuk menentukan model manakah yang dipilih antara *common effect*, *fixed effect*, atau *random effect* yang baik digunakan.

Uji Chow digunakan untuk menentukan model yang baik digunakan apakah dengan metode *Common effect* atau dengan *fixed effect*, apabila dari hasil Uji Chow tersebut ditentukan bahwa metode *common effect* yang digunakan, maka tidak perlu diuji kembali dengan Uji Husman, namun apabila dari hasil Uji Chow tersebut ditentukan bahwa metode *Fixed Effect* yang digunakan maka harus ada uji lanjutan dengan Uji Husman untuk memilih antara

metode *Fixed Effect* atau metode *Random Effect* yang akan digunakan untuk mengestimasi regresi data panel tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menentukan model regresi mana yang dipilih antara *fixed effect* atau *common effect* didalam penelitian ini maka diperlukan Uji Chow. Berikut ini adalah hasil dari Uji Chow:

Tabel 5. Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	5.685244	(3,25)	0.0041
Cross-section Chi-square	16.643835	3	0.0008

Berdasarkan tabel 5 dapat dijelaskan bahwa model regresi menggunakan model *fixed effect* dapat dilihat dari nilai probabilitasnya yaitu sebesar 0.0041 dan 0.0008 yang keduanya lebih kecil dari nilai α yaitu sebesar 0.05. Hal ini berarti persamaan model memiliki heterogenitas secara fixed.

Dengan demikian *fixed effect model* lebih sesuai untuk digunakan pada pendukung yang benar-benar substantial, misalnya tabel hasil pengujian statistik, gambar hasil pengujian model dsb.

Pembahasan hasil bersifat argumentatif menyangkut relevansi antara hasil, teori, penelitian terdahulu dan fakta empiris yang ditemukan, serta menunjukkan kebaruan temuan.

Berdasarkan hasil analisis regresi model *fixed effect* yang digunakan dalam penelitian ini maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Regresi Model Fixed Effect

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	52.49062	13.56774	3.868781	0.0007
Pendidikan	0.029172	0.075053	0.388687	0.7008
Pengangguran	0.121447	0.161227	0.815296	0.4226
Log (PDRB)	-6.689445	1.998236	-3.347676	0.0026

Berdasarkan tabel 6 maka diperoleh persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$P = 52.49062 + 0.029172 \text{ Pendidikan (E)} + 0.131447 \text{ Pengangguran (U)} - 0.689445 \text{ LogPDRB (Y)} + e \dots \dots \dots (1)$$

Interpretasi hasil persamaan regresi metode panel PLS yaitu sebagai berikut: Untuk Nilai konstanta (C) = 52.49062 berarti nilai probabilitasnya lebih besar daripada nilai alpha 0,05 maka tidak signifikan, kemudian untuk nilai koefisien pendidikan (E) = 0.029172 berarti variabel pendidikan nilai probabilitasnya lebih besar daripada nilai alpha 0,05 maka tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi tersebut., kemudian untuk nilai koefisien pengangguran (U) = 0.131447 berarti variabel pengangguran nilai probabilitasnya lebih besar daripada nilai alpha 0,05 maka tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi tersebut, dan yang selanjutnya untuk nilai koefisien PDRB (Y) = - 0.689445 berarti variabel PDRB nilai probabilitasnya lebih kecil daripada nilai alpha 0,05 maka signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi tersebut.

Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan

Berdasarkan tabel 6 nilai probabilitas sebesar (0,4226) dan koefisien sebesar (0,131447) yang menunjukkan bahwa variabel pengangguran tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY dikarenakan nilai probabilitasnya lebih besar dari α 5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY belum dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di provinsi tersebut.

Pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan menurut penjelasan Oshima (1990) bahwa rumah tangga miskin hampir tidak mungkin menjadi penganggur. Pernyataan Oshima tersebut dapat dipahami mengingat di negara berkembang seperti Indonesia tidak terdapat jaminan sosial bagi penganggur, sehingga orang miskin untuk bertahan hidup

mau tidak mau harus bekerja meskipun hanya beberapa jam seminggu.

Secara teoritis, tingkat kemiskinan akan bergerak mengikuti tingkat pengangguran. Dalam hal ini ketika tingkat pengangguran mengalami kenaikan maka secara otomatis tingkat kemiskinan akan meningkat. Tetapi dalam kasus ini, hubungan antara pengangguran dan kemiskinan tidak selalu sesuai dengan asumsi teori ekonomi yang ada, dan memiliki hubungan yang terbalik. Fenomena ini dapat dijelaskan sebagai berikut, orang yang menganggur dalam sebuah rumahtangga, tetapi ada anggota rumah tangga yang lain yang bekerja dengan tingkat pendapatan tinggi sehingga cukup untuk menyokong penganggur. Dalam kaitannya dengan kemiskinan, penganggur yang ada di rumah tangga tersebut tidak secara otomatis menjadi miskin karena ada anggota keluarga lain yang memiliki pendapatan yang cukup untuk mempertahankan keluarganya hidup berada di atas garis kemiskinan.

Pengaruh Pendidikan Terhadap Kemiskinan

Berdasarkan tabel 6 nilai probabilitas sebesar (0,7008) dan koefisien sebesar (0,029172) yang menunjukkan bahwa variabel pendidikan yang diproksi dengan angka partisipasi sekolah tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY karena nilai probabilitasnya lebih besar dari α 5%.

Kondisi Pendidikan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY masih mengalami kendala didalam sistem pendidikannya, buktinya masih rendahnya angka partisipasi sekolah yang ada di provinsi tersebut di berbagai golongan tingkat pendidikan dari SD, SMP, SMA, dan PT sehingga akan membuat laju pertumbuhan pendidikan di provinsi tersebut menjadi lambat. Didalam jangka panjang akan mempengaruhi kurangnya tenaga kerja yang akan dihasilkan oleh lulusan dari tingkat pendidikan tersebut dikarenakan masih banyaknya lulusan yang tidak mempunyai keterampilan atau keahlian yang khusus untuk memasuki lapangan

pekerjaan sehingga akan menyebabkan kemiskinan meningkat karena kurangnya tenaga kerja yang dihasilkan oleh lulusan pendidikan tersebut.

Kesimpulannya bahwa pendidikan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY pada tahun 2009-2016 belum mampu untuk mengurangi tingkat kemiskinan dikarenakan angka partisipasi sekolah di berbagai tingkatan (SD, SMP, SMA, dan PT) yang tergolong rendah karena masih banyaknya orang miskin yang ada di provinsi tersebut sehingga akan membuat perkembangan pendidikan akan menjadi lambat yang akan berdampak pada kurangnya tenaga kerja yang dihasilkan oleh lulusan dari tingkatan pendidikan di provinsi tersebut sehingga akan menyebabkan kemiskinan akan meningkat di provinsi tersebut.

Pengaruh PDRB Terhadap Kemiskinan

Berdasarkan tabel 6 nilai probabilitas sebesar (0,0026) dan koefisien sebesar (-6,689445) yang menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY karena nilai probabilitasnya lebih besar dari α 5%.

Menurut Sukirno (1999), laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil. Selanjutnya pembangunan ekonomi tidak semata-mata diukur berdasarkan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) secara keseluruhan, tetapi harus memperhatikan sejauh mana distribusi pendapatan telah menyebar kelapisan masyarakat serta siapa yang telah menikmati hasil-hasilnya. Sehingga menurunnya PDRB suatu daerah berdampak pada kualitas konsumsi rumah tangga. Dan apabila tingkat pendapatan penduduk sangat terbatas, banyak rumah tangga miskin terpaksa merubah pola makanan pokoknya ke barang paling murah dengan jumlah barang yang berkurang.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan

pembangunan dan merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya ialah bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Artinya, pertumbuhan tersebut hendaklah menyebar disetiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin. (Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti, 2008).

Nilai PDRB di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY pada tahun 2009-2016 mampu untuk mengurangi kemiskinan di provinsi tersebut karena nilai PDRB yang semakin meningkat setiap tahunnya dan menyebar di semua golongan baik itu golongan atas, menengah, maupun bawah termasuk penduduk miskin di provinsi tersebut sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil yang didapatkan dari penelitian terhadap faktor kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY pada tahun 2009-2016 menggunakan regresi data panel dan asumsi klasik dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut:

Variabel pengangguran tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY hal ini disebabkan karena orang yang masuk dalam kategori pengangguran belum tentu tergolong orang yang miskin jika didalam rumah tangganya terdapat anggota keluarga yang bekerja dengan pendapatan yang tinggi sehingga akan cukup untuk menyokong penganggur. Dalam kaitannya dengan kemiskinan, penganggur yang ada di rumah tangga tersebut tidak secara otomatis menjadi miskin karena ada anggota keluarga lain yang memiliki pendapatan yang cukup untuk mempertahankan keluarganya hidup berada di atas garis kemiskinan

Variabel pendidikan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY hal ini

disebabkan karena masih rendahnya angka partisipasi sekolah di provinsi tersebut yang disebabkan oleh banyaknya penduduk miskin yang ada di provinsi tersebut sehingga menyebabkan seseorang tidak mampu untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini akan berdampak pada kurangnya tenaga kerja yang dihasilkan oleh lulusan dari tingkatan pendidikan di daerah tersebut dan apabila angka partisipasi sekolah meningkat tiap tahunnya tetapi tidak dibekali oleh keterampilan yang khusus bagi para pendidik hal ini berarti para lulusan tersebut belum siap terjun ke lapangan kerja sehingga belum mampu untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di provinsi tersebut.

Variabel PDRB signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY hal ini disebabkan karena nilai PDRB yang semakin meningkat setiap tahunnya dan menyebar di semua golongan baik itu golongan atas, menengah, maupun bawah termasuk penduduk miskin di Provinsi tersebut sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY.

DAFTAR PUSTAKA

- Ala, Andre Bayo. (1981). Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan. Yogyakarta: Liberty.
- BAPPENAS. (2013). Pembangunan Daerah Dalam Angka Tahun 2013. Jakarta: Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Bappenas.
- Benoit, Kenneth. (2011). Linear Regression Models with Logarithmic Transformations. Methodology Institute, London School of Economics.
- BPS. (2016). Kemiskinan Nasional. <http://www.bps.go.id/kemiskinan> Indonesia. (diunduh tanggal 26 September 2017)
- Hermanto Siregar & Dwi Wahyuniarti. (2008). "Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin". Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Marmujiono, Slamet Priyo. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Dan Strategi Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Brebes Tahun 2009-2011. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj/article/view/3521>. (Diunduh tanggal 16 Oktober 2017)
- Meyer, Andrew. 2015. Is unemployment good for the environment?. *Resource and Energy Economics*, Volume 45, August 2016, Pages 18-30
- Mubyarto. (2004). Teori Ekonomi dan Kemiskinan. Yogyakarta: Aditya Media.
- Oshima, Herry. (1990). Population and Inequality in East Asia, *Malayan Economic Review* 15: pp. 7-41
- Puspita, D. W. (2015). Analisis Determinan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *JEJAK Journal of Economics and Policy*, 8 (1): 100-107.
- Suparlan, Parsudi. (1993). Kemiskinan di Perkotaan. Cetakan Kedua. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sukirno, Sadono. (1999). "Makroekonomi Modern". Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Wibowo, Mohamad Erhan. (2014). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pertanian, Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah). *Journal Of Economics*. Vol 3, No 4 Hal: 1-9. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Yoga Permana, Anggit. (2012). Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan, dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2004-2009. <http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod=viewarticle&article=75117>(Diunduh tanggal 14 Oktober 2017)